



Komunikasi Kepemimpinan Wali Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Dalam Mengelola Kebijakan Pemerintahan Nagari

Fani Ratny Pasaribu^{1*}, Yumi Aryati², Roby Hadi Putra³, Mercya Vaguita⁴, Nursaadah Kudri⁵

^{1,2,3,5} Ilmu Administrasi Negara, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁴ Ilmu Administrasi Negara, STISIP Imam Bonjol, Padang, Indonesia

*penulis korespondensi: faniratnypasaribu@unespadang.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 12 Februari 2023

Received in revised form 22 April 2023

Accepted 15 July 2023

ABSTRACT

Artikel ini membahas tentang komunikasi kepemimpinan wali nagari barulak kecamatan tanjung baru dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari yang berada di Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Permasalahan komunikasi dalam kepemimpinan Wali Nagari Barulak dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari sangat beragam dan kompleks. Beberapa permasalahan yang terjadi di Wali Nagari Barulak adalah sebagai berikut: kurangnya komunikasi efektif: ketidaktersediaan informasi, komunikasi hierarkis yang kaku, media sosial dan teknologi, keterbatasan sumber daya, dan pola komunikasi tidak teratur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data berdasarkan observasi langsung, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil analisis dari artikel ini yaitu komunikasi kepemimpinan wali nagari barulak memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat, serta dalam memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kemajuan nagari. berikut beberapa prinsip dan strategi komunikasi kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh wali nagari: transparansi, komunikasi dua arah, penyampaian visi dan tujuan, keterlibatan masyarakat, adaptasi gaya komunikasi, penanganan konflik, pemanfaatan teknologi, edukasi dan kesadaran, konsistensi.

Keyword:

Komunikasi, Kepemimpinan, Kebijakan, Wali Nagari

PENDAHULUAN

Komunikasi dalam kepemimpinan wali nagari memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari. Sebagai pemimpin,

wali nagari perlu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, aparatur pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang

¹faniratnypasaribu@unespadang.ac.id

kondusif dalam mengambil keputusan dan mengimplementasikan kebijakan. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan wali nagari dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari terdapat dalam Pasal 10 yaitu Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2018 Bab I Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, Wali Nagari adalah pemerintah Nagari, Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga Wali Nagari sebagai pemegang kewenangan pemerintah nagari yang berupa hak dan kekuasaan untuk melakukan penyelenggaraan peraturan untuk kemaslahatan masyarakatnya mengundang Perwanag yang kedudukannya berada setelah peraturan daerah. Wali Nagari dalam menjalankan tugas seperti menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nagari, merupakan tugas Wali Nagari yang harus terlaksana di nagari yang menjadi wilayah kekuasaan Wali Nagari, guna untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan bagi masyarakat nagari maupun nagari. Dalam hal pemberdayaan masyarakat nagari, Badan Permusyawaratan nagari juga memegang peranan yang sangat penting

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan/kebijakan Wali Nagari serta mitra kerja Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Nagari sangat dibutuhkan guna lebih menghidupkan penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan asas demokrasi.

Berdasarkan hasil observasi langsung dan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, Permasalahan komunikasi dalam kepemimpinan Wali Nagari Barulak dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari sangat beragam dan kompleks. Beberapa permasalahan yang terlihat adalah sebagai berikut: (1) Kurangnya komunikasi efektif: Wali Nagari sering mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan visi, tujuan, dan kebijakan pemerintahan kepada masyarakat nagari secara jelas dan efektif. Ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman atau kebingungan di kalangan warga, yang pada akhirnya dapat merugikan pelaksanaan kebijakan. (2) Ketidaktersediaan informasi: Jika informasi terkait kebijakan dan perencanaan pemerintahan nagari tidak tersedia dengan baik, hal ini dapat membuat komunikasi menjadi cacat. Warga mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebijakan yang dijalankan, dan ini dapat mengganggu partisipasi dan dukungan mereka. (3) Ketidaksetujuan dan konflik: Adanya perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan mengenai kebijakan tertentu dapat menyebabkan konflik di antara wali nagari, staf pemerintahan, dan warga nagari. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan inklusif bisa memperburuk situasi ini. (4) Gagalnya mendengarkan pendapat Warga: Jika wali nagari tidak memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan masukan, saran, atau kritik terhadap kebijakan, hal ini dapat

mengurangi rasa memiliki dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. (5) Komunikasi hierarkis yang kaku: Pendekatan komunikasi yang terlalu hierarkis dan formal dapat membuat warga merasa sulit untuk berinteraksi dengan wali nagari. Hal ini mungkin menghambat aliran informasi yang seharusnya bebas mengalir antara pemerintah dan masyarakat. (6) Media sosial dan teknologi: Pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi dalam komunikasi pemerintahan nagari dapat menjadi peluang besar, tetapi juga dapat menjadi tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang tidak akurat atau tidak resmi dapat dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebingungan. (7) Keterbatasan sumber daya: Terbatasnya sumber daya seperti anggaran, personel, dan infrastruktur komunikasi bisa menjadi hambatan dalam menjalankan komunikasi yang efektif. Ketidakmampuan untuk memberikan informasi dengan tepat waktu dan secara luas dapat mengurangi transparansi dan keterbukaan pemerintahan. dan (8) Pola komunikasi tidak teratur: Ketidakteraturan dalam menyampaikan informasi, seperti rapat-rapat yang tidak terjadwal atau kurangnya saluran komunikasi yang tetap, dapat menghambat aliran informasi yang konsisten dan terorganisir.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Kepemimpinan Wali Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru dalam Mengelola Kebijakan Pemerintahan Nagari.

KAJIAN TEORITIS

Kepemimpinan

Pemimpin merupakan orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga, Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Suradinata (1997) Sedangkan kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Pemimpin jika dialih bahasakan ke bahasa Inggris menjadi "*Leader*", yang mempunyai tugas untuk lead anggota di sekitarnya. Kepemimpinan atau *leadership* termasuk kelompok ilmu terapan atau *applied science* dari ilmu- ilmu sosial sebab prinsip- prinsip dan rumusan rumusannya bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebagai langkah awal untuk mempelajari dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek- aspek kepemimpinan dan permasalahannya. Menurut Robbins (2016 : 127) bahwa pemimpin (*leader*) adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Kepemimpinan (*leadership*) merupakan proses memimpin sebuah kelompok itu dalam mencapai tujuannya. Menurut Taryaman (2016 : 7) secara umum dapat dikatakan bahwa "kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok individu untuk saling bekerja sama, tidak saling menjatuhkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi". Menurut Vincent Gaspersz dalam Mallapiseng (2015 : 16) mengemukakan bahwa " kepemimpinan adalah proses dimana seseorang atau sekelompok orang lain menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran dan tujuan".

Berdasarkan pengertian kepemimpinan menurut para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan cara memimpin serta mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Indikator – indikator kepemimpinan menurut (Kartono, 2013) diantaranya:

1. Kemampuan analitis Kemampuan menganalisa situasi yang dihadapi secara teliti, matang, dan mantap, merupakan prasyarat untuk suksesnya kepemimpinan seseorang.
2. Ketrampilan berkomunikasi Dalam memberikan perintah, petunjuk, pedoman, nasihat, seorang pemimpin harus menguasai teknik-teknik berkomunikasi.
3. Keberanian Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi ia perlu memiliki keberanian yang semakin besar dalam melaksanakan tugas.
4. Kemampuan mendengar Bisa untuk mendengarkan pendapat dari bawahan sehingga bawahan tidak hanya diberi tugas saja akan tetapi dengarkanlah apa pendapat dari bawahannya.
5. Ketegasan dalam menghadapi bawahan dan menghadapi ketidakpastian sangat penting bagi seorang pemimpin.

Fungsi Kepemimpinan

Pendapat (Reza, 2010:34), secara operasional ada 5 fungsi pokok kepemimpinan antara lain:

1. Fungsi instruktif, pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar

keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.

2. Fungsi konsultatif, pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.
3. Fungsi partisipasi, dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.
4. Fungsi delegasi, dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuai atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri.
5. Fungsi pengendalian, fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus berusaha mampu mengatur aktivitas anggota-anggotanya secara dengan terarah dalam mengkoordinasi yang efektif, sehingga dapat memungkinkan tercapainya tujuan itu bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan

bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Tipe atau macam gaya Kepemimpinan

Menurut Robbins dalam Fahmi, dkk (2014), terdapat empat macam gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan Direktif Gaya kepemimpinan yang mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan dan harapan bawahan
2. Gaya kepemimpinan Suportif Gaya kepemimpinan suportif *member* perhatian kepada para bawahan, memperlihatkan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan menciptakan suasana yang bersahabat dalam unit kerja karyawan.
3. Gaya kepemimpinan Partisipasif Gaya kepemimpinan yang meminta dan menggunakan saran dari bawahan dalam rangka mengambil sebuah keputusan.

Indikator gaya kepemimpinan

Menurut Kartono dalam Lisa Parmita, (2017) indikator gaya kepemimpinan menyatakan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan mengambil keputusan Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.
2. Kemampuan memotivasi Kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Kemampuan komunikasi Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik, secara langsung lisan atau tidak langsung.
4. Kemampuan mengendalikan bawahan Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau jabatan secara efektif dan pada tempatnya.
5. Tanggung jawab Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban yang wajib menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
6. Kemampuan mengendalikan emosi Kemampuan mengendalikan emosional adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita mengendalikan emosi semakin mudah kita akan meraih kebahagiaan.

Komunikasi Kepemimpinan

Komunikasi secara etimologis berasal dari perkataan latin "*communication*" istilah ini bersumber dari perkataan "*communis*" yang berarti sama, sama disini maksudnya sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di seluruh dunia, karena dengan berkomunikasi segala maksud dan tujuan seseorang bisa tercapai. Komunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata dari mulut saja namun komunikasi pun bisa dilakukan dengan media dan aspek-aspek

lain di luar penggunaan kata-kata yang dihasilkan oleh mulut manusia. Terdapat banyak ahli yang telah melakukan kajian teori tentang komunikasi kepemimpinan. Di bawah ini, saya akan menyebutkan beberapa ahli terkenal beserta tahun kajian mereka:

1. Kurt Lewin (1939): Lewin adalah seorang psikolog sosial yang mengemukakan teori gaya kepemimpinan, yang mengategorikan gaya kepemimpinan menjadi tiga tipe: autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Dia menyoroti bagaimana gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja kelompok.
2. Rensis Likert (1961): Likert mengembangkan model sistem manajemen partisipatif dan teori kepemimpinan yang menekankan kolaborasi dan partisipasi anggota tim dalam proses pengambilan keputusan.
3. Blake dan Mouton (1964): Mereka merumuskan model *grid* kepemimpinan (*Leadership Grid*) yang menggambarkan dua dimensi utama kepemimpinan, yaitu "*Concern for People*" dan "*Concern for Production*", yang menghasilkan berbagai gaya kepemimpinan, seperti kepemimpinan tugas (*authority-compliance*), kepemimpinan tim (*country club*), dan lainnya.
4. Warren Bennis (1985): Bennis adalah seorang ahli manajemen yang berfokus pada kepemimpinan transformasional. Dia mengidentifikasi karakteristik kepemimpinan yang efektif, termasuk visi, integritas, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain.
5. James MacGregor Burns (1978): Burns memperkenalkan konsep kepemimpinan transformasional dan transaksional dalam teorinya. Kepemimpinan transformasional melibatkan inspirasi, visi, dan pengaruh yang membantu mengubah dan meningkatkan orang-orang serta organisasi.
6. John Kotter (1990an): Kotter dikenal karena konsepnya tentang manajemen perubahan dan kepemimpinan. Dia mengemukakan model delapan langkah untuk merancang dan mengelola perubahan organisasi.
7. Daniel Goleman (2000): Goleman dikenal karena teorinya tentang kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*). Dia berpendapat bahwa faktor-faktor emosional, seperti kesadaran diri, pengaturan diri, empati, dan hubungan sosial, memiliki peran penting dalam kepemimpinan yang efektif.
8. Simon Sinek (2009): Sinek dikenal karena konsep "Golden Circle" dan bukunya yang berjudul "*Start with Why*." Dia berpendapat bahwa pemimpin yang efektif harus memahami dan mengkomunikasikan alasan mengapa suatu tindakan atau visi dilakukan, bukan hanya fokus pada apa atau bagaimana.
9. Brené Brown (2010an): Brown membawa konsep ketangguhan (*vulnerability*) ke dalam diskusi tentang kepemimpinan. Dia mengajukan bahwa kepemimpinan yang kuat melibatkan ketangguhan dalam menerima ketidakpastian dan kelemahan pribadi.
10. Amy Cuddy (2012): Cuddy dikenal karena penelitiannya tentang "*power poses*" dan bagaimana postur tubuh dapat mempengaruhi persepsi diri dan rasa percaya diri, yang juga memiliki implikasi pada komunikasi kepemimpinan.

Pengertian Wali Nagari

Nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah Pemerintahan terendah. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada

Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.” Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Penyebutan Desa/ Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang di sebut Pemerintahan Nagari. Di sini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau. Pemerintahan Nagari sampai pada sebelum tahun 1979 menjadi Pemerintahan terendah yang ada di Sumatera Barat. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status dari Nagari dihilangkan dan diganti dengan Desa. Kedudukan Wali Nagari Juga dihapus dan Administrasi Pemerintahan dijalankan oleh Kepala Desa.

Pemberlakuan Undang-Undang ini merupakan bentuk penyeragaman Pemerintahan terendah yang disebut Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa merupakan Pemerintahan langsung di bawah Camat yang tersebar dalam Wilayah Kabupaten/Kota. Perbedaan karakter yang terdapat pada Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Nagari menyebabkan Ulayat tidak akan terurus dan Desa akan

kehilangan hak otonomnya dikarenakan Pemerintahan Desa memisahkan antara urusan Pemerintahan dan Adat Istiadat. Istilah Nagari kembali dimunculkan kepermukaan dan digunakan di Minangkabau sejak terjadinya reformasi Pemerintahan, sehingga merubah arah Pemerintahan menuju Otonomi Daerah. Hal ini diawali dengan lahirnya Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 Huruf H Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa : “Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong:2009). Teknik pengambilan data berdasarkan observasi langsung, wawancara, studi kepustakaan dan dari jurnal online. Dari pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis sebagai pembahasan dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Komunikasi dalam Kepemimpinan Wali Nagari

Perangkat Wali Nagari berperan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang ada di nagari Barulak. Nagari adalah unit pemerintahan tingkat desa atau kelurahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terutama di Sumatera Barat. Struktur pemerintahan nagari melibatkan seorang wali nagari sebagai pemimpin eksekutif dan dewan nagari sebagai wakil rakyat. Dalam mengelola kebijakan, komunikasi antara wali nagari dan dewan nagari serta masyarakat menjadi penting untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menjalankan tugasnya di nagari, perangkat daerah dapat dilihat dari Tabel.1:

Tabel.1 Perangkat Nagari Barulak

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Mulyadi DT. Bandaro Bodi	Wali Nagari	SLTA
2	Satria	Sekretaris Nagari	S1
3	Muslim Jamal	Kasi Pemerintahan	S1
4	E. DT Mangiang Sati	Kasi Kesra	D3
5	Titik Vinorika	Kaur TU dan Umum	S1
6	Dian Wahyuni Esra	Kasi Pelayanan	S1
7	Melya Wahyuna	Kasi Perencanaan	S1
8	Noviandi	Kaur Keuangan	D3
9	Aldo Vero	Kepala Jorong Dalam Nagari	D3
10	A. DT Indo Basa	Kepala Jorong Aua	SLTP
11	DF. DT Paduko Sati	Kepala Jorong Koto Nan Tuo	SLTA
12	Jasrizal	Kajor Kapuak Koto Panjang	SLTA
13	Asfirman	Kepala Jorong Lompatan Datar	SLTP

Dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa latar belakang komunikasi kepemimpinan wali nagari dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari melibatkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas

pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di tingkat nagari. Beberapa faktor latar belakang yang perlu dipahami dalam hal komunikasi kepemimpinan adalah:

1. **Peran Kepemimpinan Wali Nagari:** seorang wali nagari memiliki peran sentral dalam mengelola pemerintahan di tingkat nagari. Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program-program nagari. Keterlibatan dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk dewan nagari, instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat, akan memengaruhi kualitas dan penerimaan kebijakan yang diambil.
2. **Partisipasi Masyarakat:** nagari adalah bagian dari masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan adalah aspek penting dalam memastikan kebijakan yang diambil relevan dan dapat diterima oleh warga nagari. Komunikasi yang efektif oleh wali nagari dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses ini.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan tentang kebijakan, anggaran, dan implementasi menjadi penting untuk membangun kepercayaan antara wali nagari dan masyarakat. Ini juga membantu dalam memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan.
4. **Teknologi dan Komunikasi Digital:** penggunaan teknologi dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif bagi wali nagari dalam berkomunikasi dengan masyarakat, menyampaikan informasi, menghimpun masukan, dan mempromosikan kebijakan. Namun, penting untuk memastikan bahwa

aksesibilitas teknologi ini merata di masyarakat nagari.

Komunikasi dalam konteks kepemimpinan wali nagari bukan hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan proses mendengarkan, memahami, dan berinteraksi dengan berbagai pihak terkait. Komunikasi yang efektif dapat membantu wali nagari memahami aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan yang sesuai. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Barulak Bapak Mulyadi, mengatakan bahwa pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan Wali Nagari terlihat dari sikap pemimpin yang:

***Dapat Membangun Kepercayaan:** artinya komunikasi yang baik membantu membangun kepercayaan antara wali nagari dan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, masyarakat akan merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah nagari. Selanjutnya seorang pemimpin harus **Menghindari Miskomunikasi:** karena kurangnya komunikasi atau miskomunikasi dapat menyebabkan konflik dan kebingungan. Oleh karena itu, wali nagari perlu memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan tepat sehingga tidak terjadi interpretasi yang salah.*

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara di atas, didukung dengan indikator kepemimpinan menurut (Kartono, 2013) diantaranya:

1. Kemampuan analitis Kemampuan menganalisa situasi yang dihadapi secara teliti, matang, dan mantap, merupakan prasyarat untuk suksesnya kepemimpinan seseorang.

2. Ketrampilan berkomunikasi Dalam memberikan perintah, petunjuk, pedoman, nasihat, seorang pemimpin harus menguasai teknik-teknik berkomunikasi.
3. Keberanian Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi ia perlu memiliki keberanian yang semakin besar dalam melaksanakan tugas.
4. Kemampuan mendengar Bisa untuk mendengarkan pendapat dari bawahan sehingga bawahan tidak hanya diberi tugas saja akan tetapi dengarkanlah apa pendapat dari bawahannya.
5. Ketegasan Ketegasan dalam menghadapi bawahan dan menghadapi ketidakpastian sangat penting bagi seorang pemimpin.

Komunikasi Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Mengelola Kebijakan Pemerintahan Nagari

Komunikasi kepemimpinan seorang wali nagari memiliki peran yang krusial dalam menjaga harmoni, koordinasi, dan pembangunan di tingkat desa. Sebagai pemimpin, seorang wali nagari perlu menguasai berbagai bentuk komunikasi untuk efektif berinteraksi dengan beragam stakeholder, seperti warga desa, anggota pemerintahan, dan pihak luar. Komunikasi langsung dengan warga desa memungkinkan wali nagari untuk memahami aspirasi dan kebutuhan mereka secara mendalam, serta menjelaskan visi pembangunan desa secara jelas. Selain itu, komunikasi internal dengan anggota pemerintahan desa menjadi penting agar upaya pembangunan dapat terkoordinasi dengan baik. Di samping itu, kemampuan berkomunikasi dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi dan pihak eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan, membantu dalam mengamankan sumber daya dan dukungan untuk proyek-proyek desa.

Dalam semua bentuk komunikasinya, kejujuran, kecerdasan emosional, dan kemampuan mendengarkan adalah kunci dalam membangun hubungan yang kuat, memperoleh dukungan, dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat desa secara keseluruhan. Komunikasi kepemimpinan dalam konteks "wali nagari" mengacu pada interaksi dan pertukaran informasi antara pemimpin atau kepala desa dengan masyarakat di tingkat nagari dalam suatu sistem pemerintahan desa atau nagari.

Komunikasi kepemimpinan wali nagari barulak memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat, serta dalam memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kemajuan nagari. Berikut beberapa prinsip dan strategi komunikasi kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh wali nagari:

1. **Transparansi:** Wali nagari harus memastikan bahwa informasi terkait rencana, program, anggaran, dan keputusan penting yang berdampak pada masyarakat disampaikan dengan jelas dan transparan. Ini akan membantu masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan membangun kepercayaan.
2. **Komunikasi Dua Arah:** selain menyampaikan informasi, wali nagari perlu mendengarkan aspirasi, masukan, dan keluhan dari masyarakat. Membuka kanal komunikasi yang efektif untuk masyarakat menyuarakan pendapatnya bisa melalui pertemuan-pertemuan, forum diskusi, atau bahkan media sosial jika diterapkan dengan bijak.
3. **Penyampaian Visi dan Tujuan:** seorang wali nagari perlu mampu menjelaskan visi, tujuan, dan rencana strategis nagari kepada masyarakat. Komunikasikan dengan cara yang inspiratif dan mudah dimengerti agar masyarakat dapat merasa termotivasi untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan tersebut.
4. **Keterlibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap perkembangan nagari. Komunikasi yang baik dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat.
5. **Adaptasi Gaya Komunikasi:** setiap masyarakat memiliki keunikan budaya dan cara berkomunikasi. Wali nagari perlu memahami dan menghormati cara berkomunikasi yang lebih sesuai dengan budaya lokal agar pesan dapat diterima dengan baik.
6. **Penanganan Konflik:** jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat di antara masyarakat, wali nagari dapat berperan sebagai mediator. Dengan berkomunikasi secara bijaksana dan mendengarkan semua pihak, konflik dapat diatasi secara konstruktif.
7. **Pemanfaatan Teknologi:** di era digital saat ini, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat. Namun, penting untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan tepat.
8. **Edukasi dan Kesadaran:** Wali nagari juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu penting seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lainnya melalui komunikasi yang terencana.
9. **Konsistensi:** penting bagi wali nagari untuk konsisten dalam komunikasi. Pesan yang konsisten akan membantu membangun citra

yang baik dan menghindari kebingungan di kalangan masyarakat.

Dengan menerapkan strategi komunikasi kepemimpinan yang baik, seorang wali nagari dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, memastikan partisipasi aktif dalam pembangunan nagari, dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan.

Kebijakan wali nagari memegang peran sentral dalam mengatur dan mengarahkan perkembangan suatu nagari. Wali nagari bertanggung jawab dalam merumuskan serta menjalankan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan potensi lokal nagari. Dalam upaya ini, wali nagari perlu mengadopsi pendekatan inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, pemuda, perempuan, dan warga pada umumnya. Kebijakan yang diambil oleh wali nagari sebaiknya berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pemeliharaan budaya tradisional. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya nagari juga merupakan aspek penting yang harus dijunjung tinggi. Dengan menjalankan peran ini secara efektif, wali nagari dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan holistik nagari sambil tetap memelihara identitas dan nilai-nilai lokal.

Kebijakan wali nagari Barulak yang telah dilakukan oleh Bapak Mulyadi DT. Bandaro Bodi pada masa jabatannya sebagai Wali Nagari adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur: Wali nagari telah merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah

mereka, seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, dan lain-lain.

2. Pendidikan dan Kesehatan: Kebijakan terkait pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah nagari juga menjadi tanggung jawab wali nagari. Sejauh ini wali nagari barulak telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses pendidikan baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi demi mendapatkan pendidikan yang layak. Serta layanan kesehatan baik dari tingkat bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Wali nagari barulak telah berperan banyak dalam hal ini.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Wali nagari juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan skala kecil.
4. Pemberdayaan Masyarakat: kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk program-program pelatihan dan pengembangan ekonomi, seringkali menjadi fokus dalam tugas wali nagari.
5. Pengelolaan Konflik: dalam beberapa kasus, wali nagari juga terlibat dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan di antara warga nagari.
6. Perlindungan Budaya dan Adat: mengingat konteks adat Minangkabau, wali nagari juga dapat mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pelestarian budaya, tradisi, dan adat istiadat setempat.
7. Partisipasi Masyarakat: kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal juga bisa menjadi bagian dari peran wali nagari.
8. Pengelolaan Keuangan Nagari: Wali nagari juga terlibat dalam pengelolaan keuangan nagari, termasuk anggaran dan pengeluaran untuk kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, komunikasi kepemimpinan wali nagari harus memprioritaskan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi untuk mencapai pengelolaan kebijakan pemerintahan nagari yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh indikator gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kartono dalam Lisa Parmita, (2017) sebagai berikut:

1. Kepemimpinan mengambil keputusan Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.
2. Kemampuan memotivasi Kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Kemampuan komunikasi Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik, secara langsung lisan atau tidak langsung.
4. Kemampuan mengendalikan bawahan Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau jabatan secara efektif dan pada tempatnya.
5. Tanggung jawab Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban yang wajib menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
6. Kemampuan mengendalikan emosi Kemampuan mengendalikan emosional adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita mengendalikan emosi semakin mudah kita akan meraih kebahagiaan.

Strategi Komunikasi Kepemimpinan Wali Nagari

Strategi komunikasi kepemimpinan seorang Wali Nagari Barulak melibatkan keterampilan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan warganya serta memastikan aliran informasi yang efektif. Dengan pendekatan inklusif, seorang Wali Nagari harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap masalah dan kebutuhan warga, baik melalui pertemuan tatap muka maupun platform digital. Selain itu, ia harus mampu mengkomunikasikan visi dan tujuan jangka panjang kepada warga dengan cara yang inspiratif dan mudah dipahami. Strategi tersebut juga melibatkan pemberian umpan balik terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program yang dijalankan, sehingga tercipta rasa transparansi dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam situasi krisis atau perubahan Wali Nagari Barulak perlu berkomunikasi dengan jujur dan tenang, memberikan arahan yang jelas serta solusi yang membangun. Dengan demikian, strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif akan mampu memupuk rasa kepercayaan,

solidaritas, dan kerjasama di antara warga Nagari untuk mencapai kemajuan bersama.

1. Komunikasi terbuka dan transparan: Wali nagari perlu menerapkan komunikasi terbuka dengan selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana, kebijakan, dan program pemerintah. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, sosial media, atau saluran komunikasi lainnya.
2. Mendengarkan aspirasi masyarakat: Wali nagari harus melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi dengan mendengarkan aspirasi, masukan, dan keluhan mereka. Ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah, rapat umum, atau wawancara langsung.
3. Berbagai saluran komunikasi: gunakan berbagai saluran komunikasi seperti surat kabar lokal, radio komunitas, atau media sosial untuk mencapai berbagai kelompok masyarakat dan memastikan informasi dapat diakses oleh semua orang.
4. Kolaborasi dengan aparatur pemerintahan: komunikasi antara wali nagari dan aparatur pemerintahan juga penting. Melalui komunikasi yang baik, kebijakan dapat dijalankan dengan lebih lancar dan harmonis.

Dengan mengatasi permasalahan komunikasi ini, Wali Nagari dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan warga dan memastikan bahwa kebijakan pemerintahan nagari dapat dijalankan dengan efektif dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

SIMPULAN

1. Faktor latar belakang yang perlu dipahami dalam hal komunikasi kepemimpinan adalah: peran kepemimpinan wali nagari, partisipasi masyarakat, transparansi dan

akuntabilitas, dan teknologi dan komunikasi digital.

2. Komunikasi kepemimpinan seorang wali nagari memiliki peran yang krusial dalam menjaga harmoni, koordinasi, dan pembangunan di tingkat desa. Sebagai pemimpin, seorang wali nagari perlu menguasai berbagai bentuk komunikasi untuk efektif berinteraksi dengan beragam stakeholder, seperti warga desa, anggota pemerintahan, dan pihak luar. Komunikasi langsung dengan warga desa memungkinkan wali nagari untuk memahami aspirasi dan kebutuhan mereka secara mendalam, serta menjelaskan visi pembangunan desa secara jelas. Selain itu, komunikasi internal dengan anggota pemerintahan desa menjadi penting agar upaya pembangunan dapat terkoordinasi dengan baik.

Wali Nagari Barulak perlu berkomunikasi dengan jujur dan tenang, memberikan arahan yang jelas serta solusi yang membangun. Dengan demikian, strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif akan mampu memupuk rasa kepercayaan, solidaritas, dan kerjasama di antara warga Nagari untuk mencapai kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Reza, Regina, 2010, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Banjarnegara. Universitas Diponegoro, Semarang. Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar Santosa Perkasa
- Kartono. Kartini. (2009). Pemimpin dan Kepemimpinan :Apakah Pemimpin Abnormal Itu?. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mallapiseng, Y. (2015). Kepemimpinan. Yogyakarta: Deepublish.
- Paramita, L. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Administrasi Negara*, 5(3), 6168-6182.

Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. 2016. *Manajemen*, Jilid 1 Edisi 13, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta.

Robbins, Stephen P., dan Judge, Timothy A. (2014). *Perilaku Organisasi* (Edisi 16). Jakarta: Salemba Empat.

Taryaman, E. (2016). *Manajemen SDM* (ke 10). Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Wawancara Wali Nagari Barulak Bapak Mulyadi DT Bandaro Bodi, pada 07 Agustus 2023, pukul 14.00 Wib.